



Rencana Strategis
Sekretariat DPRD
Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Kebumen
Sekretariat DPRD
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini disusun berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Usaha-usaha yang dilakukan adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Kami menyadari bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 belum cukup sempurna seperti yang diharapkan. Untuk itu, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami tunggu untuk penyempurnaannya.

Kebumen, 24 September 2021
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen

Dra. MM. Sri Kuntarti, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680720 198803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEBUMEN. 7	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	7
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	11
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	11
2.2.2 Lingkungan Sekretariat DPRD	12
2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana	12
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	15
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	15
2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	21
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	22
3.3 Telaah Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	24
3.3.1 Sekretariat Jenderal DPR RI	24
3.3.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD.....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan	28
4.2 Sasaran.....	28

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII PENUTUP	53
8.1 Pedoman Transisi.....	53
8.2 Kaidah Pelaksanaan	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat DPRD 2016-2021	11
Tabel 2-2 Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya	11
Tabel 2-3 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	12
Tabel 2-4 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	13
Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	16
Tabel 2-6 Capaian Kinerja Program Sekretariat DPRD	16
Tabel 2-7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD	18
Tabel 3-1 Identifikasi permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	21
Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	29
Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	30
Tabel 6-1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD	32
Tabel 6-2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD	36
Tabel 7-1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	51
Tabel 7-2 Rumus Perhitungan Indikator	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Draf Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	8
Gambar 3.1 Pohon Masalah Pelayanan Sekretariat DPRD	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Selanjutnya disebut Renstra) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen (selanjutnya disebut Renstra Sekretariat DPRD) ini disusun sebagai dokumen induk yang menjadi acuan arah mana yang akan dituju oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen (Selanjutnya disebut Sekretariat DPRD) dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra ini juga akan menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renstra Sekretariat DPRD ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, di mana RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi dan misi kepala daerah. Singkatnya, Renstra merupakan salah satu instrumen kunci bagi kepala daerah untuk mewujudkan visi dan misinya secara lebih detail sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah.

Renstra Sekretariat DPRD ini secara umum diamanatkan pembentukannya oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana beberapa tujuan dari pembentukan Renstra adalah sebagai dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan perangkat

daerah dan bahwa hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra menjadi bahan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMD. Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD ini disusun dengan tahapan-tahapan yaitu 1). Persiapan Penyusunan; 2). Penyusunan Rancangan Awal; 3). Penyusunan Rancangan; 4). Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 5). Perumusan Rancangan Akhir dan 6). Penetapan.

Penyusunan Renstra ini tidak dapat lepas dari berbagai tuntutan, baik yang berasal dari luar Sekretariat DPRD maupun dari dalam Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kebumen (Selanjutnya disebut DPRD). Tuntutan-tuntutan tersebut arah utamanya adalah perlunya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dicirikan dengan terus meningkatnya profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, berorientasi pelayanan dan partisipasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD, idealitas di atas termanifestasi dalam kerangka sejauh mana Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD agar DPRD dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sejauh mana Sekretariat DPRD dapat menjadi jembatan penghubung yang baik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan antara DPRD dengan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD ini berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud agar ada jaminan konsistensi dan keterkaitan yang erat antara perencanaan yang telah disusun oleh Sekretariat DPRD dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Kebijakan yang tercantum di dalam Dokumen RPJMD, sehingga target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat terkawal dan terpenuhi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD ini adalah agar dokumen Renstra ini menjadi:

- a. Acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD pada periode tahun 2021-2026.
- b. Acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya selama kurun 2021-2026.

- c. Acuan dalam pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD pada periode tahun 2021-2026.
- d. Acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

Bab II berisi penjelasan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dan identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Bab III dimulai dengan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Selanjutnya telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V mengandung rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang merupakan indikator kunci yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan dan kaidah-kaidah pembiayaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD adalah salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan keuangan kepada DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka tipologi Sekretariat DPRD adalah Tipe A yang berarti berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan fungsi pendukung serta penunjang Pemerintahan Daerah memiliki beban kerja besar.

Sedangkan landasan operasional pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD adalah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Peraturan Bupati tersebut, Tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

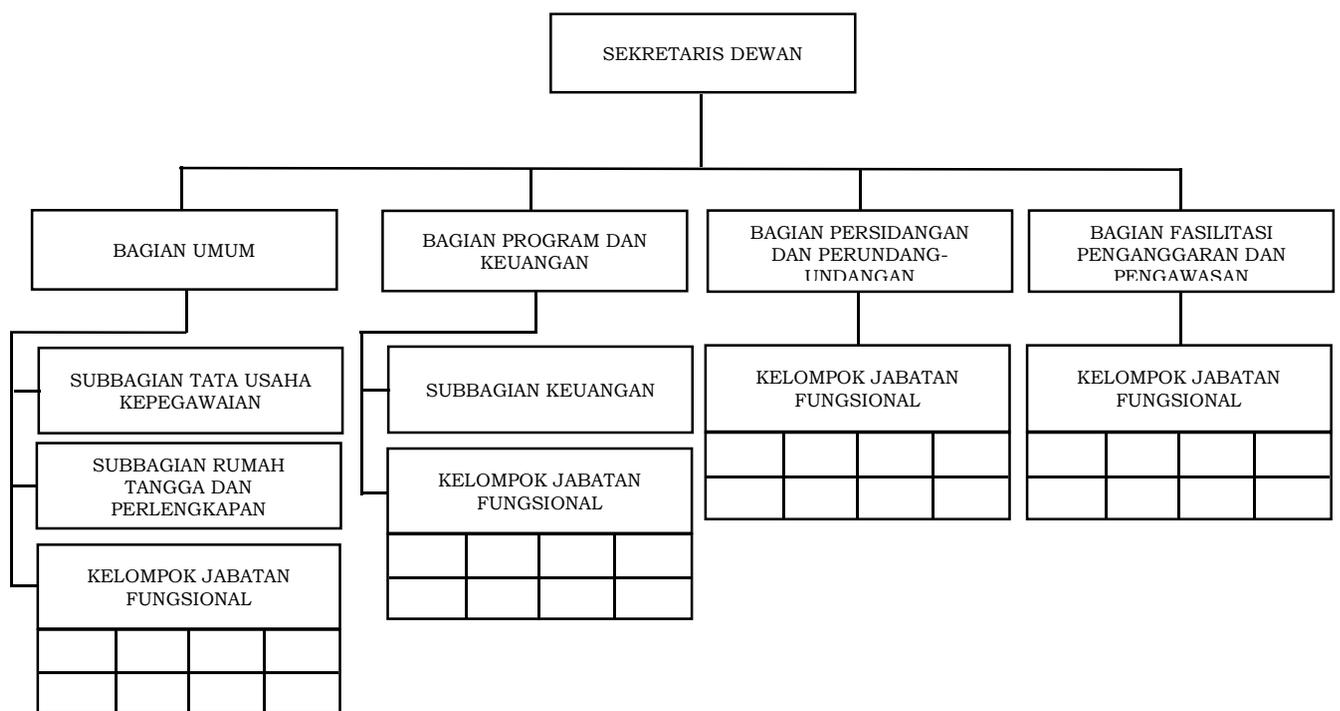
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun draf Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang telah diusulkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Draf Struktur Organisasi tersebut dapat dijelaskan dalam gambar struktur sebagai berikut:



Gambar 2.1
Draf Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sedangkan tugas dan fungsi setiap bagian adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Umum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 2. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
 3. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
 4. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

5. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 6. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
 7. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 8. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
 9. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD.
- b. Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 2. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 3. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
 4. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 5. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 6. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 7. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 8. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 9. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 10. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 11. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
 12. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
- c. Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan
1. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
 2. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 3. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
 4. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 5. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
 6. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 7. menyusun risalah rapat;
 8. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
 9. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);

10. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
 11. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
 12. menyelenggarakan publikasi; dan
 13. menyelenggarakan keprotokolan.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
1. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 2. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
 3. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 5. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 6. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 7. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
 8. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 9. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 10. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 11. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 12. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 13. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia aparatur Sekretariat DPRD selama lima tahun terakhir cenderung stagnan dan perubahan-perubahan minor yang terjadi disebabkan oleh adanya pegawai yang purna tugas. Rincian jumlah aparatur Sekretariat DPRD tahun 2016 sampai akhir April 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat DPRD 2016-2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	23	22	23	24	21	21
2	Perempuan	8	9	9	7	8	8
	Jumlah	31	31	32	31	29	29

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

Jumlah tersebut belum ideal, untuk menunjang fasilitasi yang optimal untuk Lembaga DPRD dibutuhkan 50 orang. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain adalah arsiparis, perencana/analisis dokumen anggaran dan perancang perundang-undangan dan pranata humas.

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-2
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Sekretaris DPRD	II.b	1
2	Kepala Bagian	III.a	4
3	Kepala Sub Bagian	IV.a	3
4	Kelompok Jabatan Fungsional	-	23

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

Sedangkan kualifikasi sumber daya pegawai Sekretariat DPRD menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021

Tingkat pendidikan yang ditamatkan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D3/S1	S2	S3	
2	3	9	11	4	0	29
6,89%	10,34%	31,04%	37,93%	13,80%	0%	100%

Dari tabel diatas, komposisi terbesar pegawai di lihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah D3/S1 sebesar 37,93% dan SMA sebesar 31,04%. Tingginya jumlah pegawai dengan pendidikan SMA cukup berpengaruh kepada kualitas fasilitasi, terutama terkait dengan fasilitasi yang membutuhkan penguasaan teknologi informasi dan kemampuan teknis lainnya seperti kearsipan, perencanaan dan penyusunan rancangan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan tambahan personel yang memiliki kompetensi tersebut di atas. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kompetensi bagi seluruh ASN di Sekretariat DPRD terkait dengan tugas dan fungsi fasilitasi kepada DPRD. Peningkatan kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui sosialisasi/pertemuan/seminar/workshop yang secara rutin oleh Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ASDEKSI) maupun pihak-pihak lain.

2.2.2 Lingkungan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD terletak di Jalan Pahlawan No. 175 Kebumen, dan berada di Pusat perkantoran pemerintah, berdekatan dengan kantor Bupati Kebumen, Kantor-kantor perangkat daerah lainnya serta kantor-kantor lembaga keuangan. Kantor Sekretariat DPRD menempati lahan seluas 1.003 meter persegi dengan bangunan 2 (dua) lantai seluas 2.807 meter persegi.

2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Salah satu bagian penting yang mendukung fasilitasi Sekretariat DPRD agar dapat berjalan optimal adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan, peralatan dan perlengkapan kerja, mebelair, sarana komunikasi, sarana transportasi dan lain sebagainya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2-4
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan jangka 5 tahun	Perlu penambahan	Perlu pemeliharaan
	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah			
Tanah dan Bangunan	1	0	0	1	1	0	1
Kendaraan							
Mobil	15	0	0	15	15	0	15
Sepeda Motor	19	0	0	19	19	0	19
Sarana dan Prasarana Elektronik/Mekanik							
Komputer PC	15	1	0	16			
Komputer PC/Server	1	0	0	1	1	0	1
Laptop/Notebook/Tablet	56	5	3	64	106	50	61
Organ/Keyboard	1	0	0	1	1	0	1
Televisi	9	2	0	11	15	4	11
AC Split	48	0	0	48	48	0	48
AC Standing	2	0	0	2	2	0	2
Printer Dot Matrix	13	1	1	15	15	2	13
Printer Laser/Printer Tinta	25	0	0	25	25	0	25
Tape Compo	2	0	0	2	2	0	2
LCD Proyektor	8	0	0	8	16	8	8
Amplifier	1	0	0	1	1	0	1
Mixer Amplifier	2	0	0	2	2	0	2
Speaker	12	0	0	12	12	0	12
Amplifier Wireless	4	1	0	5	5	1	4
Wireless TOA	1	1	0	2	2	0	2
Microphone	16	0	0	16	16	0	16
Microphone Conference	53	0	0	53	53	0	53
Mesin Faximili	1	0	0	1	1	0	1
Pesawat Telephone	13	1	0	14	14	0	14
Pesawat Fax	2	0	0	2	2	0	2
Kipas Angin	4	0	0	4	4	0	4
Dispenser	9	4	0	13	13	0	13
Panel Listrik	2	0	0	2	2	0	2
Otomat Genset	1	1	0	2	2	0	2
Kamera Digital	6	0	2	8	8	2	6
Handycam	2	1	0	3	1	0	1
Tape Recorder	2	0	0	2	2	0	2
Parabola	2	0	0	2	2	0	2
Ups	7	0	2	9	9	0	9
Monitor	2	0	0	2	2	2	0
Mesin Absensi	1	0	0	1	2	1	1
Mesin Potong Rumput	1	0	0	1	1	0	1
Vacum Cleaner	4	0	0	4	4	0	4
Pompa air	3	0	0	3	3	0	3
Penyemprot air	1	0	0	1	1	0	1
Pesawat HT	4	0	0	4	4	0	4
Sound system	1	0	0	1	1	0	1
Hardisk eksternal	3	0	0	3	3	0	3
Penghancur Kertas	1	0	0	1	1	0	1
Pengering Tangan	1	0	0	1	1	0	1
Lemari Es	12	0	0	12	12	0	12
Sarana dan Prasarana Kantor							
Mebelair	17	8	0	25	25	0	25
Almari Buku	22	0	0	22	22	0	22
Almari Besi	19	0	0	19	19	0	19
Almari Pakaian	9	0	0	9	9	0	19
Lemari kayu kecil	1	0	0	1	1	0	1

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan jangka 5 tahun	Perlu penambahan	Perlu pemeliharaan
	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah			
Filling Cabinet	30	0	0	30	30	0	30
Almari Olympic	3	0	0	3	3	0	3
Meja Kerja Pimpinan	19	0	0	19	19	0	19
Kursi Kerja Pimpinan	17	0	0	17	17	0	17
Sofa	13	0	0	13	13	0	13
Kursi Tumpuk	207	3	7	217	217	0	217
Meja Resepsionis	1	0	0	1	1	0	1
Meja Rapat	65	0	0	65	65	0	65
Kursi Rapat	144	0	0	144	144	0	144
Kursi Eselon II	1	0	0	1	1	0	1
Kursi Eselon III	1	0	0	1	1	0	1
Kursi Eselon IV	4	0	0	4	4	0	4
Meja Telepon	11	0	0	11	11	0	11
Kursi Pimpinan Sidang	6	0	0	6	6	0	6
Meja Pimpinan sidang	1	0	0	1	1	0	1
Papan Baliho	2	0	0	2	2	0	2
Backdroup panggung	1	0	0	1	1	0	1
Podium Besar	1	0	0	1	1	0	1
Podium Kecil	1	0	0	1	1	0	1
Podium Akrilik	1	0	0	1	1	0	1
Kursi VIP	10	0	0	10	10	0	1
Meja Eselon II	1	0	0	1	1	0	1
Meja Kerja Staff	25	0	0	25	25	0	1
Meja LCD	2	0	0	2	2	0	2
Meja Telephone	4	0	0	4	4	0	4
Meja Komputer	9	0	0	9	9	0	9
Kursi Komputer	3	2	0	5	5	0	5
Panaboard	0	0	1	1	1	0	1
Papan Tulis/ Whiteboard	11	0	0	11	11	0	1
Screen Proyektor	5	0	0	5	5	0	5
Papan Kegiatan	14	0	0	14	14	0	14
Karpet Permadani	6	0	0	6	6	0	6
Brankas	2	0	0	2	2	0	2
Rak Buku / Rak Besi	14	0	0	14	14	0	14
Meja Kristal	3	0	0	3	3	0	3
Kitchen Set	6	0	0	6	6	0	6
Almari Piring	1	0	0	1	1	0	1
Tabung Pemadam Kebakaran	7	0	0	7	7	0	7
Tabung Gas	2	0	0	2	2	0	2
Papan Dekorasi	1	0	0	1	1	0	1
Penyangga Bendera	4	0	0	4	4	0	4
Papan Display	5	0	0	5	5	0	5
Gordyn	86	0	0	86	86	0	86
Filter air	1	0	0	1	1	0	1
Kompor gas	2	0	0	2	2	0	2
vas / pot bunga	3	0	0	3	3	0	3
Rak Buku / Rak Besi	14	0	0	14	14	0	14
Tas Kamera	2	0	0	2	2	0	2
Prasasti	1	0	0	1	1	0	1
Tangga Alummunium	1	0	0	1	1	0	1
Karpet Sajadah	3	0	0	3	3	0	3
Papan Denah	1	0	0	1	1	0	1
White board	14	0	0	14	1	0	1
Kursi Tamu Vip	16	0	0	16	16	0	16
Meja Tamu Vip	9	0	0	9	9	0	9

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan jangka 5 tahun	Perlu penambahan	Perlu pemeliharaan
	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah			
Kursi Serba Guna	24	0	0	24	24	0	24
Sofa	3	0	0	3	3	0	3
Meja Bundar / Baca	1	0	0	1	1	0	1
Kasur busa	2	0	0	2	2	0	1

Sumber: Sekretariat DPRD 2021

Dari data di atas, kebutuhan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD cukup memadai, yang harus diperhatikan adalah berkesinambungannya proses perawatan dan perbaikan agar sarana dan prasarana yang dimiliki dapat terus berfungsi secara optimal.

Namun demikian untuk meningkatkan pelayanan terutama untuk mengimbangi perkembangan teknologi maka masih diperlukan beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Laptop/Tablet PC sebanyak 50 buah untuk 50 anggota DPRD
- b. LCD Proyektor sebanyak 8 buah untuk ruang paripurna 2 buah, ruang rapat komisi 4 buah, ruang rapat Bapemperda 1 buah dan ruang rapat pimpinan 1 buah.
- c. Sound system lengkap sebanyak 6 paket untuk ruang rapat komisi 4 paket, Bapemperda 1 paket dan Badan Kehormatan 1 paket.
- d. Televisi sebanyak 4 buah untuk ruang jumpa pers/perpustakaan, ruang rapat pimpinan, dan ruang rapat paripurna.
- e. Mesin Absensi sebanyak 1 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat ditelusuri dari LKjIP Sekretariat DPRD yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2-5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	25	35	45	55	65	70	25	35	45	55	65	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Sekretariat DPRD, 2021

Sedangkan capaian kinerja programnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-6
Capaian Kinerja Program Sekretariat DPRD

No.	Program	Indikator	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Program kerjasama informasi dengan mas media	Terwujudnya kerja sama informasi dengan media public	keg	15	15	15	15	15	6	15	15	15	15	15	6	100	100	100	100	100	100
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Admisnistrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Ditetapkan Perda /Raperda	Perda	28	11	10	8	17	7	15	9	10	7	10	7	53,57	81,81	100	87,50	58,82	100
4	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Pada Perangkat Daerah	Dok	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100	100
5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya Dokumen Database Perangkat Daerah	Buku	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100	100	100	100	100	100
6	Program peningkatan disiplin aparatur	Optimalisasi Kinerja Rumah Tangga dan Perlengkapan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	25	35	45	55	65	70	25	35	45	55	65	70	100	100	100	100	100	100

No.	Program	Indikator	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya nilai EKPPD	indeks	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data: Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD telah tercapai pada setiap tahun sebagaimana tercantum di dalam dokumen rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 dan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen 2026-2021. Untuk program penataan perundang-undangan yang merupakan program untuk memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 tidak tercapai 100% karena beberapa hal antara lain adalah keterbatasan waktu pembahasan oleh Panitia Khusus, belum terselesaikannya dokumen pendukung seperti naskah akademik dan dinamika sosial dan politik yang berkembang pada saat pembahasan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Sekretariat DPRD tersebut antara lain sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, lancarnya proses komunikasi baik kepada institusi DPRD maupun kepada Pemerintah Daerah karena Sekretariat DPRD adalah penyambung keduanya. Selain itu keberhasilan tersebut juga didukung adanya pertemuan rutin Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI) yang menjadi sarana berbagi pengetahuan dan tips fasilitasi kepada DPRD, termasuk aturan-aturan baru yang bergerak dinamis. Ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks dan membutuhkan usaha lebih, maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang lebih baik didukung dengan sarana dan prasana yang tidak ketinggalan jaman.

2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Sedangkan kinerja keuangan Sekretariat DPRD selama kurun waktu 2016-2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Program	Anggaran (dalam juta)						Realisasi (dalam juta)						Persentase Realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program kerjasama informasi dengan mas media	263,8	195	195	292,1	246,9	200	230,8	176,1	175,7	272,3	207,5	170	87,51	85,69	90,1	93,2	84,0	85	2,15	-0,43
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.237,2	2.154,4	1.829	1.925,8	1.538,5	1.197,5	1.753	1.592	1.400,9	1.500,1	1.238,3	900	78,36	73,90	76,59	77,89	80,49	75,18	-11,16	-0,72
3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	467	360	511,3	467,8	1.200	-	217,3	227,4	146,4	306,4	800	-	46,53	63,18	28,63	65,51	66,66	33,34	22,33
4	Program pengembangan data/informasi	85	75	75	74,2	147,9	63	49	53	54,9	63,1	108,4	55	57,65	70,72	73,18	85,00	73,32	87,33	5,82	9,53
5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25	20	20	24,7	11,5	80	19,4	17,9	17,4	22,9	9,1	70	77,60	89,95	87,20	92,76	79,57	87,5	109,14	3,00
6	Program peningkatan disiplin aparatur	420	162	200	297	237,6	604	398,8	151,6	191,7	259,6	231,6	590	94,95	93,63	95,86	87,42	97,49	95	28,95	0,23
7	Program peningkatan kapasitas lembaga	6.916,2	9.004,6	11.707	10.759,2	12.261,5	8.693	5.726,1	7.087,1	9.252,6	8.914,5	8.552,2	6000	82,79	78,71	79,03	82,86	69,75	69	7,39	-3,31

No	Program	Anggaran (dalam juta)						Realisasi (dalam juta)						Persentase Realisasi dan anggaran						Rerata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	perwakilan rakyat daerah																				
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	42,3	103,4	-	-	-	-	41,7	90	-	-	-	-	98,54	86,5	28,89	-2,44
9	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	-	100	85	-	-	-		96	80,2	-	-	-	-	96,10	94,46	-	-	-	-3,00	-0,34
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40	35,2	35,2	39,6	26,3	65	27,1	29,8	32,8	32,7	21,1	55	67,91	84,75	93,23	82,58	79,96	84,6	22,81	5,20
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.478,4	1.550,7	525	405,9	521,6	975	2.328,5	1.286,8	478,9	368,8	508	600	93,95	82,98	91,23	90,86	97,39	61,5	-2,17	-6,36
	Jumlah	12.465,6	13.763,9	15.031,3	14.330,1	15.502,1	13.180,9	10.532,9	10.698,9	11.912,8	11.580,8	11.224,5	9.330	84,50	77,73	79,25	80,81	72,41	70,78	1,6	-3,30

Keterangan: * pada tahun 2021 nomenklatur program/kegiatan mengalami perubahan, anggaran program disesuaikan dengan anggaran kegiatan yang mendekati program tersebut

** angka perkiraan

Sumber: Sekretariat DPRD 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum, anggaran Sekretariat DPRD pada kurun waktu 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata 1,6% per tahun. Yang masih perlu ditingkatkan ke depan adalah tingkat serapan anggaran karena pertumbuhan realisasi keuangannya -3,30%, apalagi tingkat realisasi anggaran paling tinggi hanya pada angka 84,5% yakni pada tahun 2016.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi mencapai tujuan strategisnya ditentukan oleh berbagai hal, yang berasal dari dalam diri organisasi tersebut maupun dari lingkungan eksternalnya yang dapat digambarkan dalam tantangan dan peluang

Dalam konteks Sekretariat DPRD maka tantangan yang dihadapi antara lain adalah:

1. Semakin dinamisnya perkembangan peraturan baik yang terkait langsung dengan DPRD maupun aturan-aturan umum terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, aparatur di Sekretariat DPRD harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya melalui studi referensi maupun mengikuti sosialisasi/seminar/workshop terkait.
2. Semakin berkurangnya jumlah pegawai Sekretariat DPRD karena purna tugas. Agar tidak menghambat kinerja Sekretariat DPRD, maka langkah-langkah seperti permohonan pegawai baru dengan kompetensi tertentu yang dibutuhkan dapat menjadi solusi.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan antara lain adalah:

1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Namun peluang tersebut harus dibarengi meningkatnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD. Kemajuan teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk fasilitasi rapat-rapat DPRD, penjangkaran aspirasi dan lain sebagainya.
2. Semakin luasnya jejaring yang dibangun Sekretariat DPRD dengan akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat dan aktor-aktor eksternal lainnya yang dapat meningkatkan kualitas fasilitasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi utama yaitu memberikan fasilitasi agar DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, tentu saja terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut:

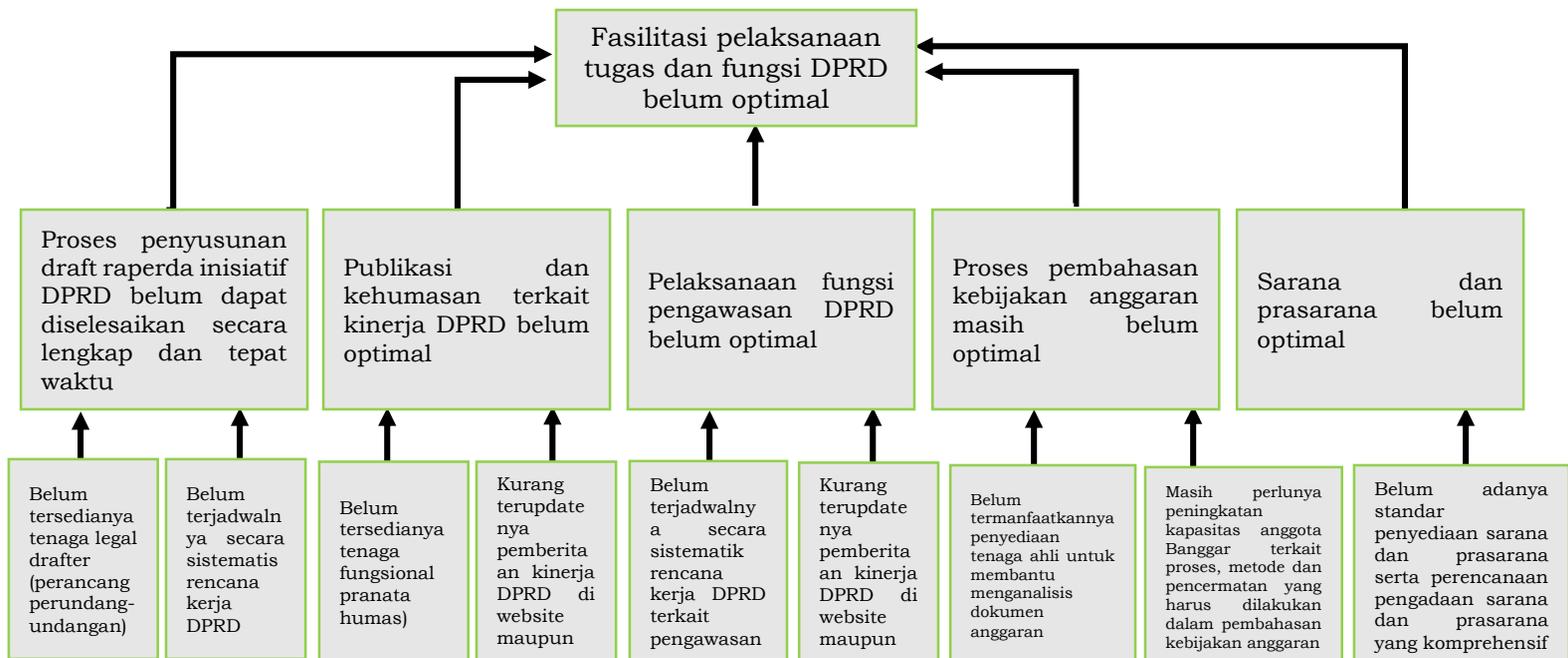
Tabel 3-1
Identifikasi permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum optimal	Proses penyusunan draft Raperda Inisiatif DPRD belum dapat diselesaikan secara lengkap dan tepat waktu	Belum tersedianya tenaga legal drafter (perancang perundang-undangan)
			Belum terjadwalnya secara sistematis rencana kerja DPRD
		Publikasi dan kehumasan terkait kinerja DPRD belum optimal	Belum tersedianya tenaga fungsional pranata humas
			Kurang terupdatenya pemberitaan kinerja DPRD di website maupun media sosial
		Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum optimal	Belum terjadwalnya secara sistematis rencana kerja DPRD terkait pengawasan
			Masih perlunya peningkatan kapasitas DPRD terkait implementasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Proses pembahasan kebijakan anggaran	Belum termanfaatkannya penyediaan tenaga ahli untuk		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masih belum optimal	membantu menganalisis dokumen anggaran
			Masih perlunya peningkatan kapasitas anggota Banggar terkait proses, metode dan pencermatan yang harus dilakukan dalam pembahasan kebijakan anggaran
		Sarana dan prasarana belum optimal	Belum adanya standar penyediaan sarana dan prasarana serta perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang komprehensif

Identifikasi permasalahan di atas dapat digambar dalam pohon masalah dibawah ini:

Gambar 3.1
Pohon Masalah Pelayanan Sekretariat DPRD



3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah cara untuk memahami arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Jika telah dipahami

dengan baik, maka Sekretariat DPRD dapat menempatkan posisinya dengan tepat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” atau “KEBUMEN SEMARAK”.

Sedangkan misinya ada 5 (lima) yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dilihat dari visi dan misi di atas, maka keberadaan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara langsung akan berkontribusi pada pencapaian misi ke-1 yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi, dengan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dan sasaran ke-1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan memperhatikan hal, Sekretariat DPRD diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada lembaga DPRD dengan bersih akuntabel. Hal ini sejalan dengan Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP). Pelayanan yang optimalnya tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitasi, baik secara administratif maupun keuangan. Peluang yang dapat diidentifikasi untuk mewujudkan hal tersebut adalah pesatnya perkembangan

teknologi komunikasi dan informasi, sedangkan hambatannya adalah rendahnya masih rendahnya kompetensi dan kemampuan beradaptasi aparatur Sekretariat DPRD dalam merespon perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

3.3 Telaah Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Telaah Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menggali keserasian atau keterpaduan terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam memberikan fasilitasi kepada lembaga DPR/DPRD. Hal ini penting untuk menggali isu-isu strategis, arah kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh lembaga sejenis di tingkat pusat dan provinsi. Hasil penggalian itu dapat menjadi salah satu pertimbangan penentuan isu strategis di Sekretariat DPRD jika terdapat kemiripan permasalahan yang dihadapi.

3.3.1 Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, lembaga ini memiliki Visi "Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Dalam rangka mendukung visi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Selanjutnya Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, tujuannya yaitu:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Sedangkan sasarannya adalah:

1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas
3. Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dari penjelasan di atas, permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang juga dialami oleh Sekretariat DPRD. Faktor pendorongnya adalah semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi sedangkan faktor penghambatnya adalah terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur dalam merespon perkembangan teknologi. Oleh karena itu penguatan kompetensi dalam penguasaan teknologi harus terus ditingkatkan.

3.3.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah ” yang kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga sasaran) yaitu:

1. Tingkat kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari penjelasan di atas, isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan dengan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD yaitu belum optimalnya fasilitasi yang diberikan

kepada DPRD. Faktor pendorong untuk mewujudkan sasaran di atas adalah besarnya dukungan yang diberikan kepada Sekretariat DPRD baik dari sisi anggaran, maupun dukungan berupa tenaga ahli alat kelengkapan DPRD, kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya antara lain adalah masih minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung fasilitasi, kurangnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

Sekretariat DPRD adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi penunjang pemerintahan dengan fungsi-fungsi yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD lainnya. Dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, Sekretariat DPRD tidak memiliki program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan hal tersebut sehingga tidak akan dibahas secara khusus.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari beberapa penjelasan di atas maka permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD 5 (lima) tahun ke depan adalah belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD untuk mengimbangi tuntutan fasilitasi yang optimal dan dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan. Kompetensi yang perlu ditingkatkan terutama terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis dokumen kebijakan anggaran, analisis peraturan daerah, kearsipan, kehumasan, dan perencanaan.
2. Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitasi, termasuk penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah perangkat tablet/laptop untuk

menunjang kinerja DPRD sekaligus mengurangi konsumsi kertas, penggunaan aplikasi e-notulen untuk keperluan dokumentasi rapat DPRD dan aplikasi database untuk menghimpun usulan pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, inovasi-inovasi pelayanan lain berbasis teknologi informasi dimungkinkan berkembang di tahun-tahun mendatang

3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD. Akuntabilitas kinerja dan keuangan ini terkait dengan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan. Selain itu, akuntabilitas kinerja dan keuangan ini juga ditunjukkan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, termasuk laporan terkait pengelolaan barang milik daerah.

Dengan penekanan pada isu-isu strategis tersebut di atas, maka diharapkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dapat diatasi sehingga fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilaksanakan dengan optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Perumusan tujuan ini harus realistis dan merupakan rangkuman dari solusi atas isu-isu strategis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Selain itu perumusan tujuan ini harus pula secara eksplisit menggambarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, pada tahun 2021-2026 tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah “Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik”.

4.2 Sasaran

Sedangkan definisi sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Agar dapat memberi gambaran rumusan kondisi tersebut perlu ditetapkan indikator sasaran yang akan menjadi pijakan dalam penentuan berhasil tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana semestinya, semua indikator harus memenuhi kriteria-kriteria yang baik yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pada konteks Sekretariat DPRD, untuk mencapai tujuan tahun 2021-2026 maka ditetapkan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan pelayanan sekretariat DPRD terhadap DPRD. Rumusan ringkas tujuan dan sasaran serta indikator dan target capaiannya 2022-2026 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 4-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00
		Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	Persen (%)	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 5-1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana layanan Kedewanan dan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD	<p>Pemenuhan kebutuhan fasilitasi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Raperda sehingga menghasilkan dokumen perundang-undangan yang berkualitas dan selesai tepat waktu</p> <p>Pemenuhan kebutuhan fasilitasi dalam rangka pembahasan dokumen kebijakan anggaran sehingga</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dapat terselesaikan tepat waktu
				Pemenuhan kebutuhan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD
				Pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh lembaga DPRD
				Pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyerapan aspirasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka perlu ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sekretariat DPRD akan menjalankan 2 (dua) Program di mana satu program yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD, sedangkan program lainnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.

Berikut ini adalah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD:

Tabel 6-1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis peraturan perundang undangan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Peraturan Perundang-undangan
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
			Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
			Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
			Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester
		Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
			Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
			Sub Kegiatan Pembahasan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Sub Kegiatan Orientasi DPRD
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
			Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
			Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
			Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
		Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
			Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
		Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
			Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sedangkan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 6-2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)								
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84	83		84		85		85,5		86		86			
	Meningkatnya pelayanan sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD			Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	37.606.680	100	37.554.195	100	37.656.556	100	37.917.153	100	37.961.511	100	188.696.095	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	8	8	8	70.000	8	71.800	8	74.100	8	76.400	8	78.260	40	370.560	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5	5	5	60.000	5	61.500	5	63.500	5	65.500	5	67.000	25	317.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
			Perangkat Daerah	Daerah yang Tersusun																		
		4.02.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	3	3	3	10.000	3	10.300	3	10.600	3	10.900	3	11.260	15	53.060	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	12	2.938.602	12	2.984.069	12	3.035.130	12	3.081.927	12	3.134.425	60	15.174.153	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	29	31	31	2.833.602	31	2.879.069	31	2.925.130	31	2.971.927	31	3.019.425	31	14.629.153	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	4	105.000	4	105.000	4	110.000	4	110.000	4	115.000	20	545.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	150.000	12	140.000	12	140.000	12	140.000	12	140.000	60	710.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		4.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi perundangan-undangan yang diikuti	kali	3	3	4	100.000	4	90.000	4	90.000	4	90.000	4	90.000	20	460.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	0	0	31	50.000	31	50.000	31	50.000	31	50.000	31	50.000	31	250.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	375.000	12	349.000	12	359.500	12	363.000	12	378.000	60	1.824.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	4	4	4	15.000	4	15.500	4	16.000	4	16.500	4	17.000	4	80.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	12	80.000	12	82.000	12	85.000	12	85.000	12	88.000	60	420.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	12	110.000	12	100.000	12	105.000	12	108.000	12	112.000	60	535.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026								
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		4.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	15.000	12	15.500	60	90.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	12	30.000	12	31.000	12	32.000	12	32.000	12	33.000	60	158.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	12	100.000	12	80.000	12	80.000	12	85.000	12	90.000	60	435.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis	bulan	12	12	12	20.000	12	20.500	12	21.500	12	21.500	12	22.500	60	106.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	unit	43	154	0	0	1	10.000	0	0	0	0	25	100.000	26	110.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel	unit	42	110	0	0	0	0	0	0	0	0	20	50.000	20	0	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1	44	0	0	1	10.000	0	0	0	0	5	50.000	6	0	Set. DPRD	Kab. Kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
		4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	519.000	12	533.500	12	538.500	12	548.500	12	558.500	60	2.698.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	4.000	12	3.500	12	3.500	12	3.500	12	3.500	60	18.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	320.000	12	330.000	12	340.000	12	345.000	12	355.000	60	1.690.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	12	35.000	12	35.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	60	145.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	12	160.000	12	165.000	12	170.000	12	175.000	12	175.000	60	845.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit			390	302.252		367.000		382.000		370.000		390.000	34	1.811.252	Set. DPRD	Kab. Kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
		4.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabat yang dipelihara	unit	34	34	34	232.252	34	240.000	34	247.000	34	250.000	34	255.000	34	1.224.252	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara	unit		25	25	15.000	25	15.000	25	15.000	25	10.000	25	15.000	125	70.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit		330	330	25.000	330	50.000	330	50.000	330	40.000	330	50.000	330	215.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	unit	1	1	1	30.000	1	62.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	302.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD	bulan	12	12	12	32.314.826	12	32.132.326	12	32.132.326	12	32.317.326	12	32.132.326	60	161.029.130	Set. DPRD	Kab. Kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
		4.02.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	orang	50	50	50	31.792.326	50	31.792.326	50	31.792.326	50	31.792.326	50	31.792.326	50	158.961.630	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD	stel	5	5	6	472.500	5	290.000	5	290.000	6	475.000	5	290.000	27	1.817.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh layanan medical check up	orang	-	50	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	250.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	bulan	12	12	12	937.000	12	966.500	12	995.000	12	1.020.000	12	1.050.000	60	4.968.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.16.02	Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitas Fraksi DPRD	bulan	12	12	12	72.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	60	372.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.01.2.16.03	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah bulan pemenuhan fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	bulan	12	12	12	850.000	12	875.500	12	900.000	12	925.000	12	950.000	60	4.500.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		4.02.01.2.16.04	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12	12	15.000	12	16.000	12	20.000	12	20.000	12	25.000	60	96.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	14.924.500	100	15.485.000	100	16.307.000	100	16.167.000	100	16.447.000	100	79.330.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	Dokum en		17	29	2.340.000	27	2.305.000	27	2.370.000	27	2.370.000	27	2.430.000	90	11.815.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propempera yang tersusun	Dokum en	2	2	2	350.000	2	360.000	2	370.000	2	370.000	2	380.000	10	1.830.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda yang dibahas	Dokum en	11	7	15	1.500.000	15	1.545.000	15	1.600.000	15	1.600.000	15	1.650.000	90	7.895.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji	Dokum en	-	2	6	250.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	20	890.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau	Dokum en	-	6	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000	30	1.200.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
			dan/atau Naskah Akademik	Naskah Akademik yang tersusun																		
		4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Dokumen			6	660.000	6	690.000	6	690.000	6	690.000	6	690.000	30	3.420.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	1	115.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	5	595.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	1	115.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	5	595.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	1	115.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	5	595.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas	Dokumen	1	1	1	115.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	5	595.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.02.05	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Laporan Semester yang dibahas	Dokumen	1	1	1	100.000	1	105.000	1	105.000	1	105.000	1	105.000	5	520.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)								
		4.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	1	100.000	1	105.000	1	105.000	1	105.000	1	105.000	5	520.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Dokumen	7	7	7	210.000	7	210.000	7	210.000	7	210.000	7	245.000	35	1.085.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun	Dokumen	1	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	5	155.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang tersusun	Dokumen	1	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	5	155.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	Dokumen	1	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	5	155.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)								
		4.02.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun	Dokumen	1	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	5	155.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.03.05	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	Dokumen	1	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	5	155.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.03.06	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun	Dokumen	1	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	5	155.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.03.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati	Dokumen	1	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	5	155.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	Kegiatan	6	6	6	4.869.000	6	5.005.000	6	5.549.000	6	5.150.000	6	5.157.000	6	25.730.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		4.02.02.2.04.01	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Kali Orientasi DPRD yang dilaksanakan	Kali	0	0		0	0	0	1	405.000	1	0	1	0	1	405.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan	Kali	4	6	6	3.300.000	6	3.400.000	6	3.502.000	6	3.502.000	6	3.502.000	30	17.206.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.04.03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitas Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kegiatan	2	2	2	210.000	2	215.000	2	222.000	2	225.000	2	225.000	2	1.097.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.04.04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli	AKD	7	7	7	984.000	7	1.000.000	7	1.030.000	7	1.030.000	7	1.030.000	7	5.074.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.04.05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	Orang	7	6	7	180.000	7	185.000	7	185.000	7	185.000	7	185.000	7	920.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.04.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitas Hubungan Masyarakat DPRD	Kegiatan	4	4	4	90.000	4	95.000	4	95.000	4	98.000	4	100.000	25	478.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.04.07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	105.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	115.000	5	550.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
								4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan	3	3	3	980.000	3	1.020.000	3	1.045.000		
		4.02.02.2.05.01	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah untuk Anggota DPRD	Bulan	12	12	12	25.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	60	145.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.05.02	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	2	25.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	35.000	10	150.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.05.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD	Kali	3	3	3	930.000	3	960.000	3	985.000	3	1.000.000	3	1.000.000	9	4.875.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1		1	50.000	1	55.000	1	55.000	2	105.000	12	55.000	60	320.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en
		4.02.02.2.06.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang tersusun	Dokumen	0	0		0		0		0	1	50.000	1	0	1	50.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
		4.02.02.2.06.02	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	12	1	50.000	1	55.000	1	55.000	1	55.000	1	55.000	60	270.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.07	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas	Dokumen		1	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	5	125.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.07.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Bulan	12	12	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	60	125.000	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	Kegiatan	-	3	3	5.790.500	3	6.175.000	3	6.363.000	3	6.557.000	3	6.780.000	3	31.665.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en	
		4.02.02.2.08.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD	Bulan	-	12	12	4.260.500	12	4.600.000	12	4.738.000	12	4.880.000	12	5.050.000	60	23.528.500	Set. DPRD	Kab. Kebum en	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)								
		4.02.02.2.08.02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	Dokumen	-	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	32.000	1	35.000	5	157.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen
		4.02.02.2.08.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bulan	-	12	12	1.500.000	12	1.545.000	12	1.595.000	12	1.645.000	12	1.695.000	60	7.980.000	Set. DPRD	Kab. Kebumehen

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sekretariat DPRD dalam menentukan kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Kinerja Sekretariat DPRD harus secara linear mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, maka Sekretariat DPRD mendukung dan melaksanakan pencapaian misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e gov dan open-gov yang terintegrasi.

Sekretariat DPRD memiliki satu Indikator Kinerja Utama sebagai indikator keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu “Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” yang mendukung IKU dari Bupati Kebumen yaitu Indeks Reformasi Birokrasi untuk 5 tahun kedepan. Rumusan target IKU Sekretariat DPRD 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		Target Capain Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indikator Tujuan)	Indeks	83	84	83	84	85	85,5	86	86
1.1.1	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama)	%	-	-	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD adalah Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target sebagai tabel diatas. Indikator tersebut dibentuk oleh beberapa komponen/komposit antara lain pemenuhan fasilitas pengawasan, pemenuhan fasilitas pembahasan dokumen anggaran, fasilitas pembentukan dan pembahasan peraturan daerah/peraturan DPRD, fasilitas penyerapan aspirasi dan fasilitas peningkatan kapasitas DPRD. Rumus perhitungan ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7-2
Rumus Perhitungan Indikator

No	Indikator	Rumus
1	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survei yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
2	Indikator Kinerja Utama: Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	Capaian fasilitasi pengawasan+Capaian fasilitasi pembahasan dokumen anggaran+fasilitasi pembentukan dan pembahasan peraturan daerah/peraturan DPRD+Fasilitasi penyerapan aspirasi+Fasilitasai peningkatan Kapasitas DPRD <div style="text-align: center;">5</div>

BAB VIII

PENUTUP

Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya terkait dengan masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD, perlunya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi dan komunikasi dan perlunya peningkatan tata kelola keuangan dalam rangka mewujudkan fasilitasi yang akuntabel kepada lembaga DPRD.

Pada kurun waktu lima tahun ke depan, Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi institusi fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas. Kualitas tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat khususnya Lembaga DPRD.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) guna meningkatkan fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan Reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2027, selama masa transisi saat Renstra Sekretariat DPRD tahun 2027-2032 sedang dalam penyusunan, maka Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman.

Peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen harus mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan baik yang berasal dari internal Sekretariat DPRD maupun dari pihak eksternal. Renstra ini harus selalu menjadi rujukan utama dalam setiap pelaksanaan tugas dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD tahun 2027 dengan tetap berpedoman pada dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

- a. Seluruh Bagian di Sekretariat DPRD agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam renstra ini dengan sebaik-baiknya
- b. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, koordinasi harus terus ditingkatkan untuk menciptakan kualitas fasilitasi yang optimal
- c. Setiap penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dalam kurun waktu lima tahun harus berpedoman kepada Renstra ini untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan.
- d. Dalam rangka menjaga keterpantauan capaian target Renstra, maka evaluasi yang berkesimbangan harus dilaksanakan secara berkala.
- e. Apabila terjadi perubahan perundang-undangan ditingkat nasional maupun daerah atau hasil evaluasi yang mengharuskan perubahan, maka dapat dilakukan perubahan Renstra dengan tetap mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian target-target Renstra ini diharapkan dapat mendukung pencapaian IKU Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Indeks Reformasi Birokrasi menuju “KEBUMEN SEMARAK” Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

Kebumen, 24 September 2021
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen

Dra. MM. Sri Kuntarti, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680720 198803 2 006